

REFORMASI KAMPUNG KOTA

1. Kampung Kota dan Kota Kampung
2. Kampung dalam Konteks Perumahan Perkotaan
3. Kampung adalah Ibu Kaum Miskin
4. Program Kampung Pemerintah
5. Mengapa Jauh dari Berhasil?
6. Perang Ruang Kota
7. Perikehidupan Kaum Pinggiran
8. Realisme Politik
9. Diagram Kapitalisme yang Berlawanan dengan Pasar Sehat
10. Tiga Poros Kekuasaan Perkotaan
11. Solusi Alternatif:
Belajar dari Pengalaman Kota Porto Alegre, Brasil



“Kampung Kota” dan “Kota Kampung” (1)

Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. sumber : <http://mqb.uqm.ac.id>

- “Kampung”, diambil dari kata Melayu, awalnya merupakan terminologi yang dipakai untuk menjelaskan sistem permukiman pedesaan.
- Istilah “kampung” seringkali dipakai untuk menjelaskan dikotomi antara kota dan desa. “Kota” diartikan dengan modernitas/kemajuan sementara desa atau “kampung” diartikan dengan keterbelakangan dan ketidakmajuan.
- Istilah “kampungan” dalam bahasa Indonesia sehari-hari, seringkali dipakai untuk menjelaskan cara berpikir dan perilaku yang memalukan, jauh dari etika priyayi, dan tidak layak disandingkan dengan budaya priyayi di perkotaan.
- Dalam perkembangannya, istilah “kampung” dipakai untuk menjelaskan fenomena perumahan di perkotaan yang dibangun secara swadaya atau mandiri oleh para migran dari pedesaan. Perumahan ini disebut kampung kota atau perumahan yang seperti kampung di pedesaan, tapi berada di perkotaan.



“Kampung Kota” dan “Kota Kampung” (2)

Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. sumber : <http://mqb.uqm.ac.id>

- Istilah “kampung kota”, digunakan sejak awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda melalui program yang dikenal sebagai *Kampung Verbrechting*.
- Sejak awal, penggunaan istilah “kampung” ini memang sarat dengan pandangan yang miring. Sebagaimana dijelaskan oleh Silas (1996), di Surabaya, sejak awal, pemerintah kolonial Belanda telah memisahkan secara tegas antara warga biasa atau warga kampung (dikenal dengan *Indlandsche Gemeente*) dengan warga priyayi, pamong praja/gedongan (*Stads Gemeente*).
- Penggunaan istilah “kampung”, kemudian juga dipakai oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan Program Perbaikan Kampung atau *Kampung Improvement Program* yang diluncurkan sejak awal tahun 1960-an.
- Meskipun istilah ini sudah dipakai secara formal, penggunaan istilah kampung ini, masih saja mengandung sindiran, merendahkan dan meremehkan. Kampung, seringkali dikonstraskan atau didikotomikan dengan perumahan gedongan atau sekarang disebut sebagai perumahan real estate. Kampung adalah untuk mereka yang miskin, warga biasa atau *wong cilik*, sedangkan perumahan gedongan atau real estate untuk mereka yang kaya dan mapan.



“Kampung Kota” dan “Kota Kampung” (3)

Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. sumber : <http://mqb.uqm.ac.id>

- Memang, secara fisik, sebagian kampung dicirikan dengan ketidakaturan, ketidakseragaman, ketidakmapanan, dan bahkan mungkin ketidakamanan serta ketidaksehatan.
- Dalam banyak hal, kekhasan kampung justru terletak pada pola-pola fisik yang beragam, organik, seringkali *surprizing*, di luar kadar kreatifitas arsitek yang jenius sekalipun. Setiap kampung adalah unik, karena tiap kampung merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, dan bahkan jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu kampung di satu kota, dapatlah dipastikan akan ada seribu ragam wajah kampung dan jiwa yang berbeda.
- Sejak awal, penggunaan istilah “kampung” ini memang sarat dengan pandangan yang miring. Sebagaimana dijelaskan oleh Silas (1996), di Surabaya, sejak awal, pemerintah kolonial Belanda telah memisahkan secara tegas antara warga biasa atau warga kampung (dikenal dengan *Indlandsche Gemeente*) dengan warga priyayi, pamong praja/gedongan (*Stads Gemeente*).



“Kampung Kota” dan “Kota Kampung” (4)

Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. sumber : <http://mqb.uqm.ac.id>

- Penggunaan istilah “kampung”, kemudian juga dipakai oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan Program Perbaikan Kampung atau *Kampung Improvement Program* yang diluncurkan sejak awal tahun 1960-an.
- Meskipun istilah ini sudah dipakai secara formal, penggunaan istilah kampung ini, masih saja mengandung sindiran, merendahkan dan meremehkan. Kampung, seringkali dikonstraskan atau dikotomikan dengan perumahan gedongan atau sekarang disebut sebagai perumahan real estate. Kampung adalah untuk mereka yang miskin, warga biasa atau *wong cilik*, sedangkan perumahan gedongan atau real estate untuk mereka yang kaya dan mapan.
- Memang, secara fisik, sebagian kampung dicirikan dengan ketidakaturan, ketidakseragaman, ketidakmapanan, dan bahkan mungkin ketidakamanan serta ketidaksehatan.



“Kampung Kota” dan “Kota Kampung” (5)

Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. sumber : <http://mqb.ugm.ac.id>

- Dalam banyak hal, kekhasan kampung justru terletak pada pola-pola fisik yang beragam, organik, seringkali *surprizing*, di luar kadar kreatifitas arsitek yang jenius sekalipun. Setiap kampung adalah unik, karena tiap kampung merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, dan bahkan jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu kampung di satu kota, dapatlah dipastikan akan ada seribu ragam wajah kampung dan jiwa yang berbeda.
- Sejak awal, penggunaan istilah “kampung” ini memang sarat dengan pandangan yang miring. Sebagaimana dijelaskan oleh Silas (1996), di Surabaya, sejak awal, pemerintah kolonial Belanda telah memisahkan secara tegas antara warga biasa atau warga kampung (dikenal dengan *Indlandsche Gemeente*) dengan warga priyayi, pamong praja/gedongan (*Stads Gemeente*).



Kampung dalam Konteks Perumahan Perkotaan (1)

- Kampung merepresentasikan konsep *housing autonomy* di mana warga kampung mempunyai kebebasan dan otoritas untuk menentukan sendiri lingkungan kehidupan mereka. Kampung juga merepresentasikan apa yang dikatakan Turner sebagai *housing as a process, as a verb*. Konsep ini memaknai bahwa pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah/MBR, tidak bisa dilihat sebagai satu *one stop policy*, melainkan sebagai proses menerus yang dinamik seiring dengan proses pengembangan sosial dan ekonomi warga kota (Turner and Fichter, 1972; Turner, 1976).



Kampung dalam Konteks Perumahan Perkotaan (2)

- Di negara-negara lain, fenomena perumahan kota yang dibangun secara mandiri oleh warga mempunyai berbagai sebutan atau nama. Di Ekuador disebut *barrios* atau *ranchos* sementara di Peru dikenal dengan *barriadas* atau *barriadas marginales*. Di Meksiko dinamai *colonias populares* atau *irregulares*. Di Turki dikenal dengan sebutan *Gecekondus*. Di India fenomena ini dikenal dengan *bustees* atau *katras* dan di Itali disebut sebagai *abusivismo* atau *baracche*. Di Filipina disebut *barong-barongs* (Palmer dan Patton, 1988).
- Nama-nama tersebut merefleksikan bahwa pemukiman karya mandiri warga memang cenderung dipandang miring dan sebelah mata. Di dunia akademik, istilah yang dipakai juga cenderung menganaktirikan atau mengesampingkan fenomena ini dengan menyebutnya sebagai *informal settlement*, *illegal settlement*, atau *squatter settlement*, *slums*, *spontaneous settlement/shelter*, atau *unauthorized settlement*.



Kampung dalam Konteks Perumahan Perkotaan (3)

- Istilah dan pandangan-pandangan miring dan negatif tentang perumahan swadaya atau kampung tersebut tentunya berlawanan dengan fakta-fakta akan peran, potensi, keistimewaan, dan kekhasan kampung. Tidak saja kampung mendominasi peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia (sekitar 70 persen), kampung menjadi tumpuan perumahan 70 sampai 85% penduduk kota (Kementrian Perumahan Rakyat, 2009). Sementara itu, penyediaan perumahan melalui jalur formal oleh sektor swasta dan pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 15% dari total kebutuhan rumah di perkotaan.
- Kampung dengan demikian, telah dan masih menjadi tumpuan perumahan sebagian besar warga kota di Indonesia. Tidak saja dari segi jumlah, kampung juga menyediakan berbagai bentuk, kondisi, serta harga rumah dan kamar, yang sesuai dengan ragam kebutuhan dan kemampuan warga kota.



Kampung dalam Konteks Perumahan Perkotaan (4)

- Kampung telah merepresentasikan konsep baru pembangunan kota yaitu *compact city*. Baik dari sisi kepadatan penduduk, efisiensi lahan, dan sarana-prasarananya, kampung telah memenuhi beberapa prinsip *compact city*.
- Dari sisi guna lahannya, pola guna lahan campuran/*mixed uses* di kampung telah memberikan alternatif pola guna lahan yang efisien. Percampuran antara guna lahan perumahan dan bukan perumahan, termasuk untuk berbagai kegiatan komersial di kampung justru menjamin keberlanjutan kampung dan menciptakan kondisi kota yang *liveable* (Roychansyah and Diwangkari, 2009).
- Lebih dari sekedar sistem fisik, kampung merupakan sistem sosial yang kompleks dan dinamis. Kampung dihuni oleh beragam warga kota dengan latar belakang agama, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, etnis, dan bahkan aliran politik. Kampung menjadi semacam kolase mini warga kota yang memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan kesetiakawanan



Kampung adalah Ibu Kaum Miskin (1)

- Komunitas warga kampung mempunyai strategi *survival system* dalam menghadapi berbagai tekanan perkotaan. Kampung juga menjadi semacam “kawah candradimuka” kaum miskin urbanisator, kaum pinggiran. Migran baru dari pedesaan menjadikan kampung sebagai batu pijakan untuk mengarungi masa depan mereka di lingkungan kota. Dapat dikatakan bahwa seluruh warga miskin kota tinggal dan hidup di kampung.
- Kampung adalah ibu yang merangkul dan menyusui anak-anaknya, khususnya yang miskin, menderit, atau cacat (Mangunwijaya, dalam Laksono, 1994). Mampu-tidaknya kaum *economic survival* lepas dari jerat kemiskinan akan sangat tergantung pada kampung yang selama ini menghidupi, memproteksi, dan menjadi harapan mereka.
- Bahwa sebagian besar warga kota tinggal di kampung, menjelaskan bahwa warga kampung tidak saja merupakan pemangku kepentingan kota yang harus dicukupi aspirasi serta kebutuhannya, warga kampung juga berpotensi menjadi aktor-aktor aktif dalam politik perkotaan.

Kampung adalah Ibu Kaum Miskin (2)

- Kampung juga merupakan satu sistem ekonomi yang dinamis dan penting. Tidak saja perumahan di kampung menjadi pusat dan ajang berbagai kegiatan produktif penghuninya (*home-based enterprises*), kampung juga menjadi pendukung kegiatan ekonomi kota. Sekitar 80% rumah di kampung dimanfaatkan oleh kegiatan produktif penghuninya (Setiawan, 2000).
- Kampung terintegrasi dengan sistem kota yang luas, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi (Sastrosasmito, 2009). Fakta-fakta tentang peran kampung di atas menegaskan bahwa membicarakan kota di Indonesia, tidak akan lepas dari kampung. Kota dan kampung seperti koin, satu wujud, dua sisi.
- Kota hanya bisa hidup karena kampung-kampungnya, sementara kampung juga bisa hidup karena berada di setting kota. Kota di Indonesia adalah kota kampung, rangka atau bangun strukturnya adalah kota, tetapi isi dan jiwanya adalah kampung, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
- Pada saat yang sama tidak dapat dipungkiri bahwa kampung juga sarat dengan berbagai masalah. Kampung umumnya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ruang terbuka publik juga merupakan masalah yang menonjol di kampung.

Kampung adalah Ibu Kaum Miskin (3)

- Karena tuntutan ekonomi yang semakin besar menyebabkan penduduk kampung semakin melihat ruang sebagai komoditas dan dikomersialkan.
- Privatisasi dan komersialisasi ruang di kampung telah mengancam ruang terbuka publik yang menjadi tumpuan bernapas dan bersosialisasi warga kampung.
- Jalan *rukunan* yang awalnya merupakan representasi jiwa kesetiakawanan dan dedikasi warga kampung, menjadi semakin sempit dan hilang karena digunakan untuk berbagai kepentingan komersial (Leaf dan Setiawan, 2009). Lebih memprihatinkan lagi, telah terjadi tekanan terhadap ruang bermain untuk anak-anak di kampung.
- Gang-gang yang selama ini menjadi tumpuan ruang bermain anak-anak semakin sempit, hilang, dan sebagian dijadikan jalur kendaraan sepeda motor sehingga tidak aman bagi anak-anak.
- Sebagian kampung juga menjadi kantong-kantong warga kota yang tidak sehat, tidak produktif, dan menjadi beban sosial kota. Meskipun secara umum modal sosial di kampung masih kuat, dalam kondisi tertentu, modal sosial ini dapat tergerus, lemah, dan tidak mampu dijadikan dukungan warga kampung yang rentan.

Kampung adalah Ibu Kaum Miskin (4)

- Banyak kampung juga menghadapi konflik internal dan tidak mempunyai kepemimpinan lokal yang kuat, sehingga gagal dalam memobilisasi sumber daya sosialnya untuk kepentingan warga kampung. Kondisi ini menyebabkan warga kampung rentan dan menjadi objek eksploitasi sistem ekonomi dan sosial kota yang lebih kuat.
- Status dan legalitas kampung merupakan persoalan yang pelik dan dilematis. Memang, sebagian kampung dibangun di atas tanah yang tidak jelas kepemilikannya, misalnya tanah negara, tanah di sepanjang bantaran sungai, di kanan-kiri jalur rel kereta api, dan bahkan di kuburan-kuburan Tionghoa. Kampung semacam ini memang dapat disebut ilegal dari aspek tanahnya. Meskipun demikian, sebagian besar kampung dibangun dan dikembangkan atas dasar hak tanah yang jelas, baik bersertifikat maupun tidak.
- Dalam konteks administrasi pertanahan yang belum mapan di Indonesia, ketiadaan sertifikat tanah di kampung tidak dapat dijadikan alasan bagi pihak lain untuk mengatakannya sebagai ilegal dan tidak sah, dan dengan demikian dapat digusur. Dalam situasi dimana akses terhadap tanah kota yang semakin sulit, baik karena harga tanah yang terlalu tinggi, spekulasi tanah, dan penguasaan serta monopoli tanah oleh mereka yang mampu, pemanfaatan tanah-tanah marginal atau tanah-tanah umum oleh warga kampung yang miskin seharusnya dapat dipahami sebagai upaya *survival strategy* yang perlu dihargai.
- Sejauh kita tidak dapat melakukan reformasi tanah perkotaan yang menjamin akses tanah bagi mereka yang miskin dan rentan maka pemanfaatan tanah-tanah umum oleh warga kampung harus dilihat secara lebih proporsional.



model ekohidrologi:
dinding sungai alami
(bukan beton) sebagai
bahan riset.
membuat contoh area
pojokan kampung
pulo:
dinding alami dengan
penanaman bakau
(tidak perlu air asin) &
hutan bambu di
atasnya.

Program Kampung Pemerintah (1)

- Setiap kali dijumpai fakta betapa banyak rumah di kampung dibangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), seringkali juga dijadikan alasan bahwa kampung adalah perumahan yang liar. Dalam kondisi sistem perizinan dan persyaratan yang begitu kompleks, rumit, dan biaya tinggi, ketiadaan IMB sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan stigmatisasi liarnya kampung. Harus dipahami bahwa warga kampung seringkali mempunyai pertimbangan sendiri dalam membangun rumahnya, sementara standar bangunan yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi warga kampung.





membuat contoh area pojokan kampung pulo: dinding alami dengan penanaman bakau (tidak perlu air asin) & hutan bambu di atasnya.

Program Kampung Pemerintah (2)

- Anggaran dan kesimpulan ini dapat terjadi antara lain karena pandangan, kebijakan, serta program yang tidak sesuai terhadap kampung.
- Meskipun program perbaikan kampung telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda melalui *Kampung Verbrechting* (Silas, 1996) dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui *Kampung Improvement Program/KIP*, program-program tersebut didasarkan pada pandangan yang cenderung negatif terhadap kampung. Sebagaimana dikatakan oleh Silas (1989), program perbaikan kampung pada zaman kolonial Belanda lebih ditujukan untuk kepentingan penguasa dan warga pendudukan Belanda yang khawatir lingkungannya akan tercemar oleh wabah penyakit dari kampung-kampung kumuh di sekitarnya.





model ekohidrologi:
dinding sungai alami
(bukan beton) sebagai
bahan riset.
membuat contoh area
pojokan kampung
Pulo:
dinding alami dengan
penanaman bakau
(tidak perlu air asin) &
hutan bambu di
atasnya.

Program Kampung Pemerintah (3)

- Setelah kemerdekaan, KIP mulai lagi dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1969 di berbagai kota di Indonesia. Program ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas fisik kampung, tetapi tidak menjamin peningkatan kualitas sosial dan ekonomi penghuninya (Silas, 1996; Taylor, 1989). Hal ini disebabkan karena orientasi KIP waktu itu hanya pada peningkatan kualitas fisik dan sarana-prasarana saja.
- Setelah itu, KIP diperbaiki konsepnya, yakni dengan mengintegrasikan dimensi fisik, ekonomi, dan sosial kampung. Konsep ini dikenal dengan tribina, yang kemudian diubah menjadi tridaya, yaitu daya lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial.
- Dalam perkembangannya, khususnya setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, diluncurkan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan/P2KP yang ditujukan untuk mengentaskan warga miskin di kampung-kampung kota. Program ini kemudian diintegrasikan dalam program pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM.





model ekohidrologi:
dinding sungai alami
(bukan beton) sebagai
bahan riset.
membuat contoh area
pojokan kampung
pulo:
dinding alami dengan
penanaman bakau
(tidak perlu air asin) &
hutan bambu di
atasnya.

Program Kampung Pemerintah (4)

- Beberapa kelurahan yang telah mendapat program P2KP kemudian difasilitasi dengan apa yang dikenal dengan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/PLP-BK. Pada saat yang sama, khusus yang menyangkut kawasan kumuh, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum/PU juga mengembangkan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project/NUSSP*. Program ini berorientasi pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam bidang perumahan.
- Lebih lanjut, melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pemerintah juga meluncurkan program Rumah Susun Milik/Rusunami dan Rumah Susun Sewa/Rusunawa dengan target sekitar 350.000 unit. Sampai tahun 2010 ini baru dapat dibangun sebanyak 12.672 unit (Kementerian Perumahan Rakyat, 2010).

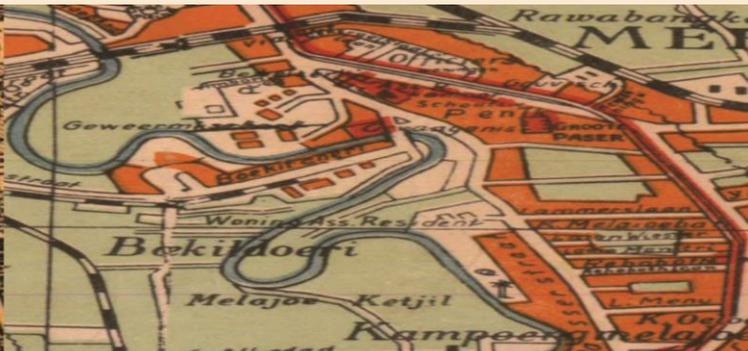
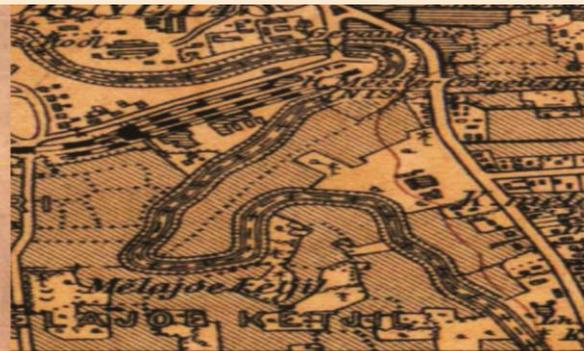


Mengapa Jauh dari Berhasil?

Mengapa berbagai program pemerintah *de facto* belum mampu menjawab persoalan kampung dan kota sejauh ini?

1. Harus dipahami bahwa skala dan cakupan persoalannya begitu besar dan kompleks. Ribuan kampung di Indonesia menghadapi persoalan dan tantangan yang tidak ringan. Dengan demikian, diperlukan kemauan politik, sumber daya, dan energi yang luar biasa untuk menangani mega persoalan ini. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari para kepala daerah, khususnya walikota, untuk terus mendukung dan menjamin perbaikan kampung dan kotanya.
2. Hampir semua program perbaikan kampung dan kota terjebak dalam pendekatan proyek yang cenderung mereduksi makna dan esensi program itu sendiri. Pendekatan proyek ini menyebabkan berbagai program dilakukan secara tergesa-gesa, mengejar batas akhir administrasi proyek, dan tidak berkelanjutan.

sumber : <http://mgb.ugm.ac.id>



KOTA PRAJA MEESTER CORNELIS

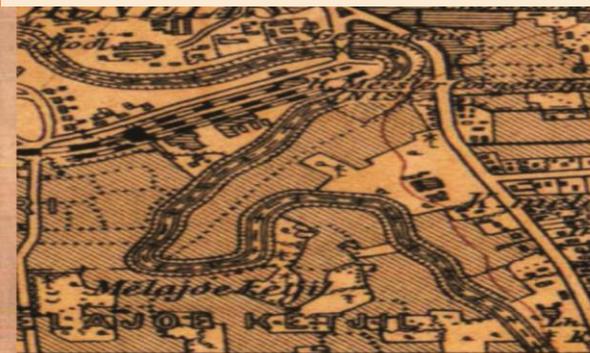
Kampung Pulo memiliki nilai historis, keberadaannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, kampung ini bagian dari Kawasan Meester Cornelis.

Sumber: Arsip Perpustakaan Nasional

Mengapa Jauh dari Berhasil? (2)

1. Program-program perbaikan kampung dan perumahan juga cenderung terkotak-kotak dan melihat isu kampung dan perumahan secara *myopik*/sempit dan tidak mengaitkan dengan isu-isu pembangunan perkotaan yang lebih luas. Eksistensi kampung tidak terlepas dari konteks lingkungan kota yang lebih luas. Perbaikan kampung, dengan demikian, harus disinergikan dengan program-program pembangunan dan peremajaan kota. Diperlukan kejelian untuk mencari ruang dan media yang memungkinkan integrasi dan sinergi antar kampung dan kota, antara dimensi formal dan informal, warga dan pemerintah.
2. Berbagai program dan strategi perbaikan kampung yang selama ini diluncurkan masih didasarkan atas pandangan yang cenderung stereotip dan negatif terhadap kampung. Kampung masih dipotret dan dipandang sebagai bagian kota yang elementer atau temporer. Program-program perbaikan kampung dengan demikian, cenderung masih dirancang sebagai program temporer dan tempelan yang bersifat sementara, sekedar untuk merespons persoalan sementara saat ini.

sumber : <http://mgb.ugm.ac.id>



KOTA PRAJA MEESTER CORNELIS

Kampung Pulo memiliki nilai historis, keberadaannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, kampung ini bagian dari Kawasan Meester Cornelis.

Sumber: Arsip Perpustakaan Nasional

Perang Ruang Kota

(Andy Siswanto, Kompas, 20 Desember 2003)

- Bisnis ruang legal VS Bisnis ruang ilegal
- Ekonomi formal VS ekonomi informal
- Masyarakat kelas menengah-atas VS masyarakat kelas bawah

Karena negara tidak menyediakan akses permukiman dan tempat berjualan yang layak buat mereka, maka pemasok ruang kumuh ilegal beroperasi dengan logika kapitalisme pinggirannya sendiri, yakni komodifikasi ilegal. Siapa pemasoknya? Pengembang ilegal yang bisa swasta, oknum pemerintah, atau kong kalikong dari keduanya. Karena adanya sirkulasi dan akumulasi kapital, maka bisnis ruang ilegal pun tumbuh subur berperang melawan bisnis ruang legal. Perang ruang ekonomi perkotaan (*the battle of economic space*) lantas tidak terelakkan lagi; formal vs informal; kelas masyarakat berduit vs kelas masyarakat pariah.

Perikehidupan Kaum Pinggiran (1)

(Andy Siswanto, Kompas, 20 Desember 2003)

- Kaum “miskin”, kaum pinggiran, sebenarnya menyadari tindakan ilegalnya sehingga tidak menargetkan bertempat tinggal tetap, apalagi dalam pengertian *dwelling*-nya Heidegger.
- Bagi kaum pinggiran, bertempat tinggal di lokasi ilegal dan berdagang informal di ruang lebih berupa pengembaraan, yang dalam pengertian Heidegger disebut *wandering*.
- Oleh karenanya, mereka sepertinya adalah *flaneur* kontemporer yang hidup dalam alam fantasi (*in the realm of the unreal*) (Edmund White, 2001).
- Mereka menyadari hidup “tidak” pada dimensi ruang dan waktu yang sudah terekternalisasi, tapi dalam kondisi mengada (*being*) yang terus menerus sehingga mereka seolah-olah larut dalam dunia “bawah sadar dan irasional”.

Perikehidupan Kaum Pinggiran (2)

(Andy Siswanto, Kompas, 20 Desember 2003)

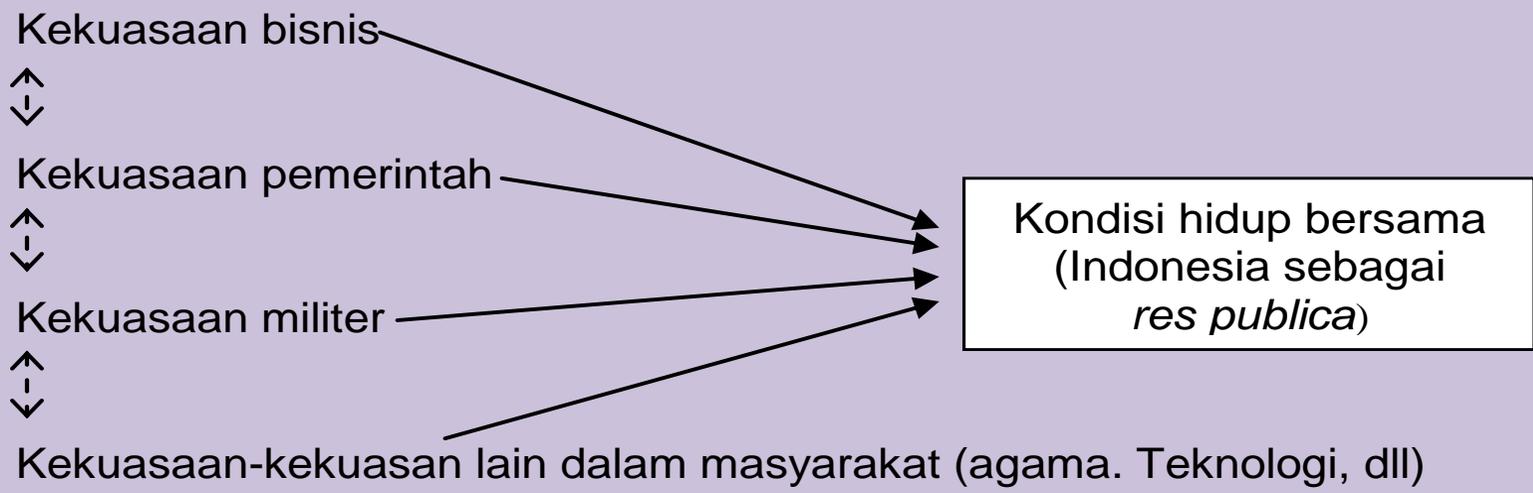
- Pengalaman kehidupan perkotaan seperti ini membangkitkan pemahaman baru tentang kehampaan kota (*urban discontent*) dan sekaligus menyumbangkan makna baru dari kekacauan dan ketidakstabilan ruang. Ruang semacam ini sering disebut sebagai *space of undeterminacy*. Adalah *wandering*, *flaneur*, dan *space of undeterminacy* tersebut yang justru membuat kota besar (kosmopolitan) di Dunia Ketiga seperti Jakarta masih bisa berfungsi secara efektif.
- Permukiman kumuh dan ruang sektor informal yang sering tidak stabil ini bila di desain secara kreatif sebenarnya sangat potensial menjadi unik dan imajinatif. Secara spesial mereka bisa juga tidak kontradiktif dengan kepentingan sektor formal yang ruangnya legal teratur.
- Secara fungsional, justru *flaneur*, dan *space of undeterminacy* inilah yang memasok produk barang dan jasa yang murah meriah di segala penjuru kota, menyediakan tenaga kerja murah bagi rumah tangga menengah ke atas, bagi industri, dan perdagangan kota. Apakah kelas menengah perkotaan menyadari peran kaum miskin ini? Tampaknya tidak. Kelas menengah justru lebih merasa terancam daripada berterima kasih.

Diagram Model-model Kekuasaan:

a. Model Tradisional:

Corak kekuasaan pemerintah =====> Kondisi hidup bersama
(situasi bisnis, sosial, kultural, agama, dsb)

b. Model Alternatif (posisi paling moderat berdasarkan fakta *polycentres of power*)



c. Model Neo-liberalisme (*de facto* Indonesia dewasa ini):

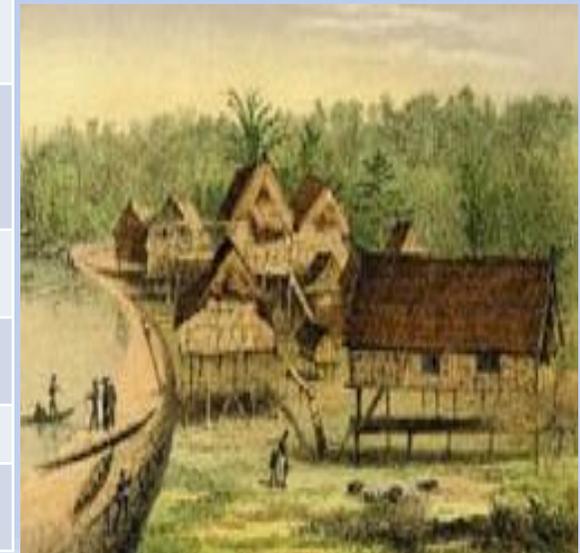
Kekuasaan bisnis ==> kekuasaan pemerintah (termasuk militer, agama, masyarakat sipil, dll) ==> Kondisi hidup bersama

Diagram Kapitalisme yang Berlawanan dengan Pasar Sehat

(David Korten, *The Post-Corporate World, Life After Capitalism*, Alkem Company (S) Pte.Ltd., Singapore, 1999)

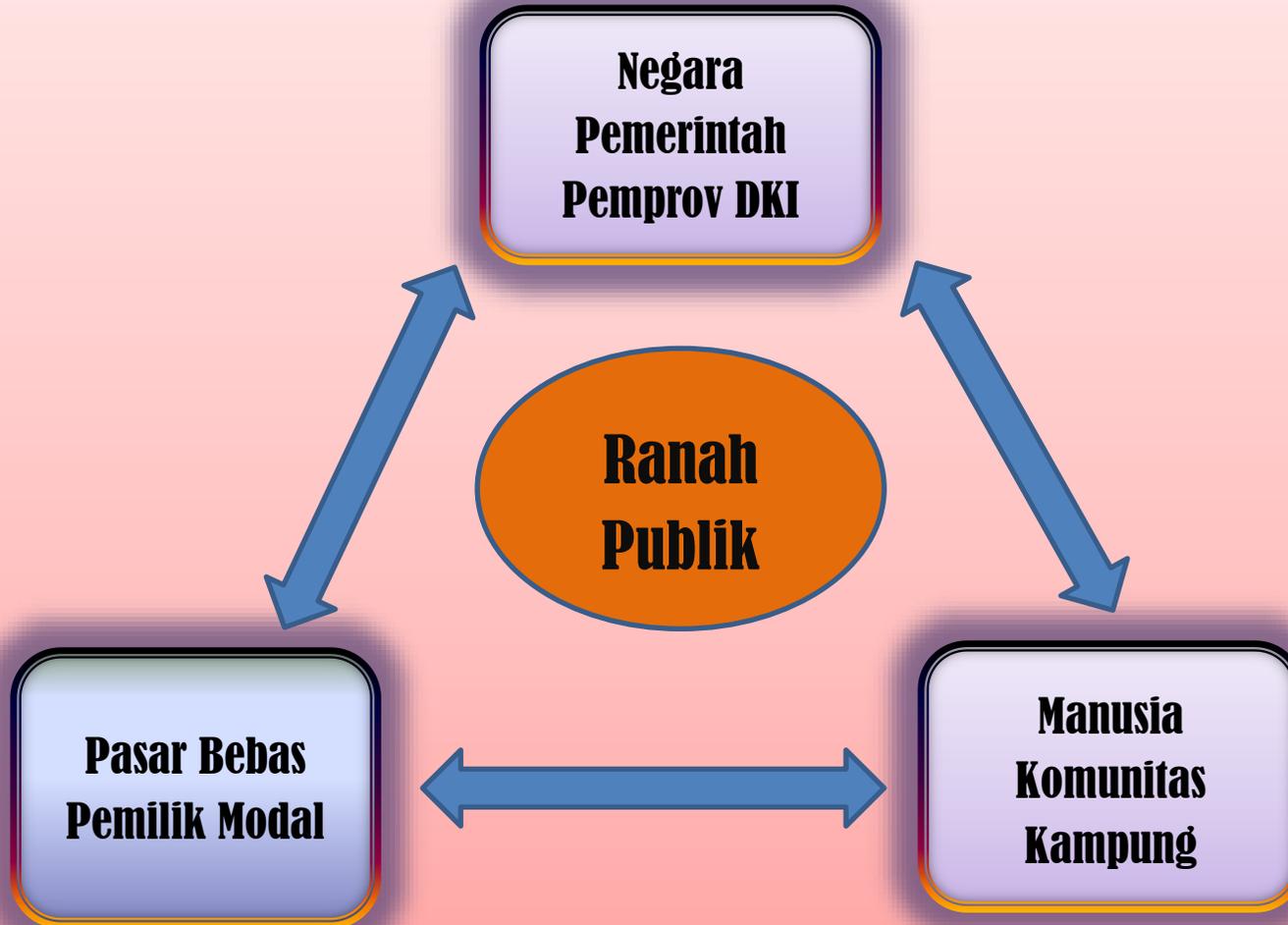


Tolok Ukur	Kapitalisme	Pasar Sehat
• Prinsip Menentukan	• Uang	• Kehidupan
• Penghela Dominan	• Menggunakan uang untuk mendapatkan uang bagi yang punya uang	• Memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup
• Ukuran Firma	• Sangat besar	• Kecil dan medium
• Biaya	• Ditanggung oleh publik	• Ditanggung oleh pemakai
• Kepemilikan	• Impersonal, absentee	• Personal, rooted
• Fianancial Capital	• Global tanpa batas	• Lokal/nasional dengan batas-batas yang jelas
• Tujuan Investasi	• Memaksimalkan keuntungan pribadi	• Meningkatkan hasil yang berguna
• Posisi Keuntungan	• Sasaran semaksimal mungkin	• Suatu insentif untuk memajukan produktivitas
• Mekanisme Pengaturan	• Direncanakan secara sentral oleh mega-korporasi	• Pasar-pasar dan jaringan-jaringan yang mengorganisasikan diri
• Tujuan Kompetisi	• Mengeliminasi yang dianggap tidak sehat	• Meningkatkan efisiensi dan inovasi
• Peranan Pemerintah	• Melindungi kepentingan properti/aset	• Memajukan kepentingan manusiawi
• Pola Kerja	• Bebas	• Fair and balance
• Pendekatan	• Elitis, demokrasi dollar	• Populis, demokrasi pribadi-manusia



Tiga Poros yang Menentukan Ranah Publik

Herry-Priyono, B., "Tiga Poros Indonesia", Kompas, 9 Januari 2004



Keterangan:

- Manusia/Komunitas/Kampung, menunjuk hubungan dan kegiatan spontan dari para warga masyarakat, tanpa ciri transaksi atau administrasi. Kerekatan manusiawi antar warga menentukan kualitas hidup komunitas. Komunitas kampung dapat terbentuk atas dasar sejarah, daerah asal, suku, ras, agama, atau bahasa yang sama.
- Pasar Bebas/Pemilik Modal, menunjuk transaksi ekonomis antar penjual dan pembeli yang dijalankan secara sukarela sesuai dengan barang dan jasa yang ada. Untung-rugi dan efisiensi ekonomis merupakan motif yang mendorong bergeraknya pasar.
- Negara/Pemerintah/Pemprov DKI, secara nyata berarti tindakan-tindakan melalui badan-badan publik, yang bertanggungjawab untuk terwujudnya tatanan hidup publik demi kesejahteraan bersama. Mereka juga punya kuasa untuk mengatur tatanan sosial.

Keterangan:

- Tiga poros kekuasaan ini yang de facto menentukan ranah publik, yang meliputi asset dan barang-barang publik, ruang publik, pelayanan-pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja (Daniel Drache, *"The Return of Public Domain after the Triumph of Markets"*, in D. Drache (ed), *The Market or the Public Domain: Global Governance and the Asymmetry of Power*, 37-71, London, Routledge, 2001).
- Semakin ketiganya berfungsi baik, semakin ranah publik dapat terjangkau oleh semua warga, juga oleh kaum miskin. Pasti akan menjadi masalah besar ketika "pasar bebas" menjadi rejim atau monster yang serakah, dan negara menjadi negara centeng atau negara makelar, komunitas kampung menjadi hakim sendiri dan main kekerasan. Masyarakat akan kehilangan rasa "kami" sebagai kesatuan sosial dari kehidupan bersama (Baca: David Marquand, *Reinventing Gladstone? The Public Conscience and the Public Domain. Global Governance and the Asymmetry of Power*, 72-84, London, Routledge, 2001).

Solusi Alternatif: Belajar dari Pengalaman Kota Porto Alegre, Brasil (1)

(Ivan A Hadar, "Kota yang Memihak Kaum Miskin", Kompas Rabu, 30 April 2008)

- *Orcamento Participaivo* (OP), dua kata berarti "Keterlibatan Warga Kota dalam penentuan APBD", adalah hal yang dilakukan secara konsekuen di Porto Alegre.
- Ketika Partai Buruh menang pemilu di negara bagian ini, dikembangkan OP yang bisa berarti "APBD partisipatif". Dalam kerangka OP, kota dibagi 16 subregion.
- Warga dalam forum-forum lokal dan regional berdiskusi tentang persoalan kota dan mencari solusinya.
- Selain mendapat informasi tentang sistem baru, warga juga dibekali brosur 30 halaman tentang fungsi dan haknya sebagai warga kota.



Solusi Alternatif: Belajar dari Pengalaman Kota Porto Alegre, Brasil (2)

(Ivan A Hadar, "Kota yang Memihak Kaum Miskin", Kompas Rabu, 30 April 2008)

- Konon, 85 persen warga Porto Alegre memahami OP dan sekitar 20.000 warga terlibat aktif dalam kepentingan dan melakukan konseling.
- Dari ratusan delegasi forum, dipilih 40 orang sebagai perwakilan dan berhak meneliti penggunaan keuntungan pemerintah kota.
- Aneka usulan dari 21 forum kota dirangkum dalam rancangan APBD, diserahkan gubernur terpilih kepada dewan kota. Dewan kota, sebagai satu-satunya instansi yang berhak memutuskan APBD.
- Dengan cara ini, sejak beberapa tahun terakhir, warga kota dapat memutuskan penggunaan dana APBD sekitar 750 juta dollar AS (sekitar Rp 8,5 triliun).



Solusi Alternatif: Belajar dari Pengalaman Kota Porto Alegre, Brasil (3)

(Ivan A Hadar, "Kota yang Memihak Kaum Miskin", Kompas Rabu, 30 April 2008)

- Sebagian besar dana itu diinvestasikan bagi kemaslahatan lapis sosial bawah, misalnya untuk kawasan kumuh, sebagian besar terlayani infrastruktur kota, seperti air minum, kanalisasi, jalan, sistem pendidikan, pembuangan dan daur-ulang sampah, perbaikan alat transportasi kota, serta jaringan pembuangan air limbah.
- "Model Porto Alegre" menjadi acuan ratusan dewan kota di Brasil. Dalam kaitan ini, model demokrasi representatif, di Brasil, kian kehilangan pamor.

I. Sandyawan Sumardi

